

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Angkutan Pelajar Disabilitas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi (*Communication*) dalam implementasi Program Angkutan Pelajar Disabilitas telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan sosialisasi kepada sekolah, orang tua, dan pelajar disabilitas, penyampaian informasi mengenai jadwal penjemputan serta rute pelayanan yang dilakukan secara jelas, dan koordinasi yang berkelanjutan antara Dinas Perhubungan, pihak sekolah, pengemudi, pendamping, serta orang tua. Komunikasi yang terjalin secara efektif mendukung pemahaman seluruh pihak terhadap mekanisme pelaksanaan program.
2. Sumber Daya (*Resources*) dalam pelaksanaan Program Angkutan Pelajar Disabilitas telah mendukung implementasi program. Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro telah menyediakan armada angkutan khusus, pengemudi dan pendamping yang memiliki pemahaman mengenai pelayanan kepada pelajar disabilitas, serta dukungan operasional dalam penyelenggaraan program. Namun demikian, keterbatasan jumlah armada dan anggaran operasional masih

menjadi kendala sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas pelayanan agar dapat menjangkau lebih banyak pelajar disabilitas.

3. Disposisi (*Disposition*) menunjukkan bahwa aparaturnya Dinas Perhubungan, pengemudi, dan pendamping memiliki komitmen yang baik dalam memberikan pelayanan kepada pelajar disabilitas. Sikap ramah, responsif, peduli, serta mengutamakan keselamatan peserta didik menjadi bentuk komitmen pelaksana dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang inklusif. Selain itu, para pelaksana telah memahami tujuan Program Angkutan Pelajar Disabilitas sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi pelajar penyandang disabilitas.
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) telah mendukung pelaksanaan Program Angkutan Pelajar Disabilitas melalui adanya pembagian tugas yang jelas, koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan sekolah dan instansi terkait, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program. Struktur birokrasi yang berjalan dengan baik memberikan kemudahan dalam koordinasi dan penyelesaian berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan pelayanan.

Secara keseluruhan, implementasi Program Angkutan Pelajar Disabilitas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan baik berdasarkan empat indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan

struktur birokrasi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait penambahan armada pelayanan, penguatan dukungan anggaran operasional, serta peningkatan koordinasi dan evaluasi secara berkelanjutan agar kualitas pelayanan kepada pelajar penyandang disabilitas dapat semakin optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Angkutan Pelajar Disabilitas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro

Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Angkutan Pelajar Disabilitas melalui penambahan jumlah armada secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pelayanan sehingga lebih banyak pelajar penyandang disabilitas dapat memperoleh akses transportasi menuju sekolah. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan dukungan anggaran operasional untuk menunjang pemeliharaan armada, pengembangan pelayanan, serta peningkatan kompetensi pengemudi dan pendamping melalui pelatihan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

2. Bagi Instansi Terkait

Dinas Perhubungan diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan Dinas Pendidikan, sekolah, serta orang tua peserta didik dalam proses

pendataan, penjadwalan, dan evaluasi pelaksanaan program. Koordinasi yang berkelanjutan akan membantu memastikan pelayanan tetap tepat sasaran serta mampu menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.

3. Bagi Pengembangan Program

Pelaksanaan evaluasi program perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk sekolah, pengemudi, pendamping, serta orang tua pelajar disabilitas. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi kendala serta merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan Program Angkutan Pelajar Disabilitas di Kabupaten Bojonegoro.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pelayanan transportasi bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan teori, metode, atau pendekatan penelitian yang berbeda, serta memperluas objek penelitian pada daerah lain. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas, kualitas pelayanan, atau tingkat kepuasan pengguna terhadap Program Angkutan Pelajar Disabilitas sehingga diperoleh rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pengembangan kebijakan pelayanan publik yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen transportasi darat: Mengatasi kemacetan lalu lintas di kota besar (Jakarta)*. Graha Ilmu.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Anderson, J. E. (2003). *Public policymaking: An introduction (5th ed.)*. Houghton Mifflin.
- Arianto, D., & Apsari, N. C. (2023). Gambaran aksesibilitas, inklusivitas, dan hambatan penyandang disabilitas dalam memanfaatkan transportasi publik: Studi literatur di berbagai negara. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(2), 156–170. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i2.42633>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.
- Aryatama, S. (2024). Navigasi menuju inklusivitas: Pengabdian masyarakat dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi untuk penyandang disabilitas. *Journal of Community Service*. <https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS/article/view/215>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Potret penyandang disabilitas di Indonesia: Hasil Long Form SP2020. BPS-Statistics Indonesia. <https://www.bps.go.id/en/publication/2024/12/20/43880dc0f8be5ab92199f8b9>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Dista Yasah, A., Ardiana, P., Indah Aprilia, D., Aprilliana Futri Gunawan, D., & Pertiwi, V. I. (2025). Evaluasi program identitas kependudukan digital (IKD) di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(2), 957–971. <https://doi.org/10.61579/future.v3i2.513>
- Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro. (2024). *Laporan program angkutan pelajar disabilitas tahun 2021–2024*. Dishub Kabupaten Bojonegoro.
- Dinas Perhubungan & Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. (2024). *Data sebaran pelajar disabilitas dan cakupan layanan angkutan*. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- Dye, T. R. (1981). *Understanding public policy (4th ed.)*. Prentice Hall.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy (14th ed.)*. Pearson Education.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

- Fakhira, N., et al. (2023). Implementasi program Aceh Green ditinjau dari perspektif teori implementasi kebijakan Edward III. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara*, 5(2), 88–102.
- Fullan, M. (2001). *The new meaning of educational change* (3rd ed.). Teachers College Press.
- Gaol, L. L., & Ivanna, J. (2024). Analisis kebijakan transportasi Transjakarta. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 4541–4549.
- Ismanto, E., Wahyudhi, I., & Melfinna. (2022). Hambatan dalam pembangunan inklusif penyandang disabilitas. *Bekasi Development Innovation Journal*, 1(1), 75–89.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). (2023). Pemerintah penuhi hak penyandang disabilitas di Indonesia. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2023). *Profil kesehatan penyandang disabilitas Indonesia*. Kemenkes RI.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>
- Maimunah. (2023). Aksesibilitas inklusif: Implementasi infrastruktur publik ramah disabilitas di Indonesia (sebuah literatur review). *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*. <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/60851>
- Marwandianto. (2018). Pelayanan transportasi publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dalam perspektif HAM. *Jurnal HAM*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Miro, F. (2012). *Pengantar sistem transportasi*. Erlangga.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Mulyah, S., & Khoiri, Q. (2023). Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan inklusif. *Journal on Education*, 5(3), 8270–8280.
- Nawawi, H. K. A., Heriyanto, M., & Othman, L. (2023). Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tunanetra dan tunadaksa di Kota Pekanbaru. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(4), 32–44.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson Education.

- Nugroho, R. (2017). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Nurdin, S., & Usman, B. (2004). *Guru profesional dan implementasi kurikulum*. Quantum Teaching.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2021). Aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 225–232. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.33529>
- Punch, K. F. (2005). *Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Rizkiya, A., & Mutiarin, D. (2021). Akses penyandang disabilitas terhadap layanan dan fasilitas transportasi publik di Kota Banda Aceh. *Arsitekno*. <https://ojs.unimal.ac.id/arsitekno/article/view/3833>
- Rusandi, R., & Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Sianipar, J. A. (2022). Analisis kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap layanan moda transportasi di DKI Jakarta. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 503–520.
- Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 31–46.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syaukani, H., Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2004). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Pustaka Pelajar.
- Vania, V., et al. (2024). Hambatan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia: Analisis berbasis survei 156 sekolah. *Jurnal Basicedu*. <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/download/10712/3833>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Usman, N. (2002). *Konteks implementasi berbasis kurikulum*. Grasindo.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara* (edisi kedua). Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2010). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus. Center of Academic Publishing Service.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

